

Selasa, 24 Januari 2012

Rekomendasi BPK Sintang Posisi ke 3 Naik 10 Poin

Sintang, BERKAT.

Kabupaten Sintang mendapatkan skor 44 atau naik 10 poin dan berada di posisi ke-3, berdasarkan penilaian BPK, terkait tingkat penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan laporan keuangan Semester II Tahun 2011.

Sementara itu sebanyak 10 dari 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat mengalami penurunan poin. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Adi Sudibyo Jumat mengatakan, hal itu berdasar hasil pantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.

"Ini juga wujud apresiasi dan pemacu atas keseriusan pemerintah daerah dalam

melakukan tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan," ujar dia.

Berdasarkan pemeriksaan BPK Perwakilan Kalbar, peringkat pertama Kabupaten Kubu Raya dengan skor 60 (naik satu poin); kedua Kabupaten Kapuas Hulu skor 53 (turun empat poin); peringkat tiga Kabupaten Sintang skor 44 (naik 10 poin) dan Kabupaten Sambas skor 42 (turun 15 poin). Peringkat empat Kabupaten Sanggau skor 37 (naik 10 poin); kelima Kabupaten Landak skor 34 (turun 10 poin); keenam Kota Pontianak skor 32 (naik tiga poin), Kabupaten Kayong Utara skor 29 (turun 8 poin). Peringkat ketujuh Kabupaten Bengkayang skor 28 (turun 15 poin), Kota Singkawang

skor 27 (turun 7 poin); kedelapan Kabupaten Sekadau skor 24 (turun 18 poin), Kabupaten Pontianak skor 23 (turun 10 poin), Kabupaten Ketapang skor 23 (naik satu poin). Peringkat sembilan Provinsi Kalbar skor 12 (turun 10 poin) dan Kabupaten Melawi skor 12 (turun dua poin).

Tolok ukur yang digunakan adalah tingkat kesesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi dan tingkat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. BPK RI Perwakilan Kalbar sampai Semester II Tahun 2011 telah menghasilkan 2.466 temuan dan 5.099 rekomendasi. Temuan dan rekomendasi itu mengalami peningkatan masing-masing 2,58 persen dan

5,16 persen dibandingkan semester sebelumnya. Sedangkan tahun lalu laju kenaikan jumlah temuan dan rekomendasi adalah 12 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Kalbar telah menuai keberhasilan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik," kata Adi Sudibyo.

Secara keseluruhan, dari rekomendasi yang telah diberikan BPK, 65,46 persen diantaranya sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 29,3 persen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan 5,24 rekomendasi belum ditindaklanjuti. "Capaian pada Semester II Tahun 2011 mengalami peningkatan lebih baik," kata dia.

Tindak lanjut yang masih dalam proses meningkat 0,7 persen dibanding semester lalu; tindak lanjut yang sesuai rekomendasi naik 8,5 persen; dan yang belum ditindaklanjuti turun tajam sebesar 10,76 persen dibanding semester lalu. (sus)